

**EVALUASI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
SEKTOR SARANA DAN PRASARANA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



Oleh

JUNAEDI
213 210 027

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

2018

**EVALUASI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
SEKTOR SARANA DAN PRASARANA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Oleh : JUNAEDI

ABSTRAK

Junaedi, Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Daerah Sektor Sarana dan Prasarana di Kabupaten Sidenreng Rappang. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data secara online.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Pada sektor Sarana dan Prasarana yaitu pembangunan jalan, Jembatan, bangunan permanen, drenase, pengairan, dan pembangunan fisik lainnya yang menunjang pembangunan daerah untuk sektor sarana dan prasarana fisik. Adapun yang menjadi kekurangan yaitu adanya beberapa program kegiatan yang tidak terealisasi dengan beberapa faktor penghambat diantaranya faktor kondisi alam/lingkungan, adanya program/kegiatan yang sifatnya tidak menentu, dan keterbatasan anggaran/biaya. Dan yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan RKPD diantaranya Koordinasi/kerja sama antar SKPD, Partisipasi masyarakat, dan Komitmen pemerintah.

Kata Kunci : *Evaluasi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah*

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana.

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya

program-program pembangunan.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya (Soekartawi:1990). Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seriring dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Memang sudah hal yang wajar apabila pemerintah saat ini lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya daerah kabupaten untuk memacu pembangunan daerah yang masih tertinggal. Alasan Pemerintah juga

menyadari hal ini, terbukti dengan program pemerintah yang akhir-akhir ini lebih menitik beratkan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten sampai dengan pedesaan yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang nomor UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana melalui Undang-undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah khususnya pemerintahan Kabupaten akan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

(sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran

yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. BAPPEDA adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, BAPPEDA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasar Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan BAPPEDA di daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAPPEDA ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya untuk daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah

dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan BAPPEDA tersebut sebagai badan yang turut aktif membantu bupati kepala daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana proses pelaksanaan, tugas dan fungsi serta bagaimana peranan BAPPEDA kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah mestilah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi instansi BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta

masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Syaifullah:2008). Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat, maka dari itu, salah satu proses yang mewadahi hal tersebut adalah dengan diadakannya musyawarah rencana pembangunan di tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan.

Gusti Zulkarnain Tompo (2015) menyatakan bahwa Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musrenbang yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang adalah Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM Desa dan permasalahan yang sedang dihadapi. Musrenbang tingkat Kecamatan memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan di tiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan fungsi dan Rencana Kerja tiap-tiap SKPD.

Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten merupakan penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan ditingkat kecamatan dan Rencana kerja masing-masing SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dari penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sementara giat-giatnya melaksanakan pembangunan daerah khususnya pada sektor saran dan prasara untuk kemajuan pembangunan daerah, untuk menjawab pertanyaan tentang bgaimana perkembangan pembangunan di kabupaten Sidenreng Rappang di lihat dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan RKPD, perencanaan pembangunan yang telah terealisasi banyak yang tidak sesuai dari yang telah di rencanakan, dan banyak pembangunan yang telah terencana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang menjadi

permasalahan dalam pembangunan daerah.

Agar pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik, oleh karena itu penulis mengambil judul “Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Daerah Sektor Sarana dan Prasarana di Kabupaten Sidenreng Rappang”.

B. Masalah penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui tentang kondisi objektif dari masalah yang diangkat penulis di daerah yang dimaksud dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Penelusuran Data *Online*, yaitu mencari dan memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian dengan mengakses internet.

E. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya dideskripsikan dan diinterpretasi

serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti.

F. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani Perencanaan Strategis jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD tahun 2016 dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tidak

lepas dari partisipasi pihak swasta dan Masyarakat demi terwujudnya pembangunan daerah.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan program pembangunan daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas PSDA hasil Musrenbang BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang pada Sektor sarana dan Prasarana sebagai salah satu penunjang pembangunan daerah.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016

| No | Nama Kecamatan | Program SKPD | | | Jumlah | Program yang tidak terealisasi SKPD | | | Jumlah | Realisasi Program | Ket. |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------|------|
| | | Bina Marga | Cipta Karya dan Tata Ruang | PSDA | | Bina Marga | Cipta Karya dan Tata Ruang | PSDA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (6-10) | 12 |
| 1 | Kecamatan Baranti | 17 | 6 | 5 | 28 | 4 | - | - | 4 | 24 | |
| 2 | Kecamatan Duapitue | 11 | 6 | 4 | 21 | 1 | - | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | Kecamatan Kulo | 19 | 2 | 3 | 24 | 3 | - | - | 3 | 21 | |
| 4 | Kecamatan Maritengae | 12 | 8 | 7 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | |
| 5 | Kecamatan Panca Lotang | 9 | 5 | 7 | 21 | 2 | - | - | 2 | 19 | |
| 6 | Kecamatan panca Rijang | 14 | 7 | 5 | 26 | 2 | 1 | - | 3 | 23 | |
| 7 | Kecamatan Pitu Riase | 15 | 3 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 8 | Kecamatan Pitu Riawa | 12 | 3 | 4 | 19 | 1 | - | 1 | 2 | 17 | |
| 9 | Kecamatan Tellu Limpoe | 9 | 7 | 6 | 22 | - | 1 | - | 1 | 21 | |
| 10 | Kecamatan Wattang Pulu | 14 | 4 | 5 | 23 | 1 | - | 1 | 2 | 21 | |
| 11 | Kecamatan Wattang Sidenreng | 11 | 6 | 6 | 23 | 1 | - | 1 | 2 | 21 | |
| Jumlah | | 143 | 57 | 57 | 257 | 18 | 4 | 6 | 28 | 229 | |

Sumber : Data Diolah 2016

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa meskipun program dari RKPD telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembangunan selama satu tahun, tapi masih ada program kegiatan yang tidak terlaksana dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi pihak instansi terkait dalam merealisasikan program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang, namun kedepannya tetap perlu ditindaklanjuti dengan adanya pembinaan, serta perlu adanya sinkronisasi antara RKPD selanjutnya agar tetap mendukung apa yang telah dilaksanakan pada RKPD tahun 2016.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas terkait pada sektor sarana dan prasarana berdasarkan RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang serta pencapaian yang telah didapatkan selama satu tahun memang sudah

dirasakan oleh masyarakat, meskipun masih ada capaian yang belum sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu kedepannya masih banyak yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan, terutama dari sarana maupun prasarana baik perkotaan ataupun pedesaan untuk menciptakan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa program dan kegiatan pada RKPD 2016 Kabupaten Sidrap pada dasarnya telah dilaksanakan oleh setiap SKPD terkait.

Adapun faktor-faktor yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD BAPPEDA tahun baik faktor pendukung maupun Faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Selama satu tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang, telah memperlihatkan

pelaksanaan yang cukup baik. Hal tersebut dapat terjadi karena kerja sama dan dukungan dari setiap pihak yang terlibat. Selain itu terdapat berbagai faktor yang mendukung sehingga program dan kegiatan dalam pelaksanaan RKPD tersebut dapat dilaksanakan. Ada 3 faktor pendukung yang akan penulis jelaskan pada bagian ini, yaitu adanya Koordinasi/kerja sama antar SKPD, Partisipasi masyarakat, dan Komitmen pemerintah.

a. Adanya Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dalam praktek pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap, dalam hal ini melaksanakan RKPD untuk

Pembangunan suatu daerah, koordinasi menjadi arti penting dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam konteks BAPPEDA yang mempunyai areal kerja dalam mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana pembangunan di daerah, maka perlu adanya langkah untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Koordinasi dalam semua praktek pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi kunci

utama dalam proses penetapan kebijakan itu sendiri.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi antar pihak-pihak dalam proses pelaksanaan RKPD Tahun 2016 untuk pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi salah satu kunci dan faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah.

b. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan RKPD untuk pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup besar. partisipasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pembangunan daerah yang cukup besar, hal tersebut tergambar dari cukup besarnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan daerah.

c. Komitmen Pemerintah

Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam pembangunan

daerah di Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Selain adanya
kesepahaman yang
dibangun bersama pihak-
pihak terkait, serta
pengawasan yang
mendalam pada proses
Pelaksanaan RKPD untuk
pembangunan daerah
tersebut.

Dari hasil penelitian,
diketahui bahwa adanya
komitmen menjadi satu hal
yang sangat penting dan
bahkan menjadi salah satu
faktor yang menjadikan
Pelaksanaan RKPD untuk
pembangunan daerah di
Kabupaten Sidenreng
Rappang dalam hal ini
selalu melakukannya monitorin
atau pengawasan yang
berkala dan untuk
memaksimalkan program
pelaksanaan RKPD tahun

2016 Kabupaten Sidenreng
Rappang.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan penjelasan
pada bagian sebelumnya, dapat
dikatakan bahwa pelaksanaan
RKPD tahun 2016 Kabupaten
Sidrap sudah berjalan. Meskipun
demikian, masih banyak hal
yang perlu diperbaiki dan
menjadi penghambat dalam
pelaksanaannya untuk menjadi
lebih maksimal lagi. Adapun
faktor penghambat yang
dimaksud diantaranya adalah
faktor kondisi alam/lingkungan,
adanya program/kegiatan yang
sifatnya tidak menentu, dan
keterbatasan anggaran/biaya.

a. Faktor kondisi
alam/lingkungan

Kendala lain yang
dirasakan selama
pelaksanaan RKPD tahun
2016 Kabupaten Sidenreng
Rappang adalah mengenai

faktor alam/lingkungan. Hal tersebut dianggap sebagai kendala yang cukup berarti dan sulit untuk ditanggulangi, terutama dari SKPD yang pelaksanaan program dan kegiatannya sangat berhubungan dengan kondisi alam dan lingkungan.

Dari hasil penelitian kondisi alam sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan program RKPD karena dapat mengubah rencana yang sudah di susun sebelumnya karena program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Dengan cara demikian, perencanaan tersebut sudah bersifat *Rolling Plan* (Perencanaan Bergulir) karena dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi alam

dan lingkungan yang tidak bisa di prediksi.

- b. Adanya program/kegiatan yang bersifat tidak menentu

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan, hal pertama yang harus diperhatikan sebelumnya adalah perencanaannya, karena pada rencana tersebut terdapat hal-hal yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Namun salah satu yang menjadi kendala adalah adanya program/kegiatan yang bersifat tidak menentu sehingga sangat sulit untuk diprediksi ke depannya. Permasalahan seperti yang dijelaskan di atas merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, karena sasaran program dan kegiatannya memang

bersifat tidak menentu. Untuk mengantisipasinya hanya bisa dilakukan dengan melakukan prediksi dan target dengan semaksimal mungkin.

c. Keterbatasnya

Anggaran/biaya

Dalam pelaksanaan program RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang, terbatasnya anggaran merupakan salah satu penghambat dalam memaksimalkan pelaksanaan RKPD karna dalam pelaksanaan RKPD anggaran/biaya yang sudah di anggarkan tidak sesuai atau dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga ada beberapa program RKPD belum rampung/selesai pelaksanaannya sesuai apa

yang ada dalam RKPD sehingga program kegiatan bisa tersendak pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang agar dalam pelaksanaannya di harapkan dapat di maksimalkan lagi dan yang menjadi faktor penghambat untuk tahun-tahun kedepannya agar kiranya bisa di minimalisir supaya pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang bisa lebih meningkat lagi dalam hal ini pembangunan sarana dan prasara pembangunan daerah.

G. Kesimpulan

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang sementara merintis pembangunannya dengan melakukan berbagai upaya berupa program dan kegiatan pembangunan daerah tahunan melalui (RKPD) kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan implementasi dari visi dan misi pemerintah daerah. Adapun

pelaksanaan RKPD tahun 2016 kabupaten Sidenreng Rappang tersebut dijelaskan berdasarkan pelaksanaan dari SKPD yang terkait untuk pembangunan daerah pada sektor sarana dan prasarana.

Pelaksanaan dari setiap SKPD tersebut diuraikan berdasarkan program pembangunan daerah melalui kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD tahun 2016 kabupaten Sidenreng Rappang tersebut. Dari uraian tersebut terlihat bahwa RKPD yang dimaksud secara mendasar telah dilaksanakan selama satu tahun masa berlakunya. Dari hasil penelitian masih ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang tertuang dalam RKPD tahun 2016 kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun terakhir.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendukung pelaksanaan

RKPD tersebut adalah adanya Koordinasi/kerja sama antar SKPD, Partisipasi masyarakat, dan Komitmen pemerintah. Kedua, faktor penghambat pelaksanaan RKPD tersebut adalah faktor kondisi alam/lingkungan, adanya program/kegiatan yang sifatnya tidak menentu, dan keterbatasan anggaran/biaya.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tersebut perlu adanya pembinaan kedepannya untuk tetap mempertahankan apa yang telah dicapai dan lebih meningkatkan lagi kedepannya, serta perlu adanya sinkronisasi antar dokumen selanjutnya sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tetap bersinergi dengan program dan kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis berharap dalam pelaksanaan program RKPD tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang pada

tahun selanjutnya dapat lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya.

Dan diharapkan untuk plaksaan program kegiatan RKPD tahun selanjutnya agar memaksimalkan lagi peran serta dan partipasi pihak-pihat terkait dalam hal ini pihat pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dapat bekerja sama untuk peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tercapai pembangunan yang lebih baik dan semakin maju di masa-masa yang akan datang, dalam hal ini pada pembangunan daerah pada sektor sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat Yasar. 2002, Evaluasi Kinerja BAPPEDA Kabupaten Barito Utara Pada Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. PT. Gramedia, Yogyakarta.

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016, Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Jumlah Penduduk tahun dan Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidrap, Badan Pusat Statistik

Bintoro Tjokroamidjojo. 1990, Perencanaan Pemabangunan, Haji Masagung, Jakarta,

Dwiyanto, Agus. 2006. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

Fisharin. 2013. Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Pada Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Jhingan. M. L. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi pertama. Rajawali Pers. Jakarta

Nur Willy. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Riyadi, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi dalam

mewujudkan otonomi daerah). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Soekartawi. 1990 Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Nasional, Raja Wali, Jakarta.

Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta

Syaifullah. 2008 Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahunan 2007)

Tompo Zulkarnain Gusti. 2015. Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jeneponto. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja, Edisi kelima. Jakarta